
THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM FOOD ON POVERTY REDUCTION IN INDONESIA

Oleh

Putri HS Rheviany¹, Yulianto Tri², Khotimah Nur³, Guntur Eko Saputro⁴, Lukman Yudho Prakoso⁵, Sri Murtiana⁶, Agus Winarna⁷, Yudi Sutrasna⁸, Edy Sulistyadi⁹, Juliana¹⁰, Gabriel Choirul Alman¹¹, Ivan Yulivan¹², Rianto¹³

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12}Prodi ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810.

¹¹Fakultas Ilmu Adminstrasi, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No.163, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

¹³STP Trisakti

Jl. IKPN Bintaro No.1, RT.4/RW.10, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330

Korespondensi: ⁵lukman.prakoso@idu.ac.id

Article History:

Received: 06-09-2022

Revised: 16-10-2022

Accepted: 23-10-2022

Keywords:

Efectivity, Social Assistance Program, Poverty

Abstract: *In Indonesia, poverty is a very crucial problem, therefore, poverty alleviation must be a top priority in economic development, both in the short and long term. In order to reduce the level of poverty in Indonesia, the Government from 2017 until now has distributed social assistance for basic food programs in 514 regencies/cities throughout Indonesia with different target recipients and aid values each year. The problem of the number of target recipients of social assistance and the value of assistance received by the community is not based on the poverty rate in Indonesia in the 2017-2022 period. This shows that the ineffectiveness of providing social assistance is due to the declining poverty rate, but the value of the assistance provided is increasing. The research approach used is using qualitative research methods using literature studies. This research is aimed at understanding meaning, understanding particular contexts, anticipating unanticipated phenomena and influences, and understanding processes. Based on the results and discussions that can be done in order to increase the Strength of the Social Assistance Program for the Sembako, it is to ensure the fulfillment of the objectives of the program, namely balanced nutrition and preventing stunting. , there are problems related to the aid received by the poor that is not timely, the basic food materials received by the community are not suitable for consumption (low quality). From the Opportunities side of the Social Assistance Program, the Sembako Program is that the basic food assistance program*

has not become one of the aids that contribute directly to poverty reduction, and the Threats are that there is no regulatory update related to the criteria for the poor, so that the regions have their own criteria, policies have not accommodated special conditions , as well as changes to regulations that change the policy for distributing social assistance programs

PENDAHULUAN

Secara umum, **kemiskinan** didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang /sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang layak menurut **(TNP2K,2020)**

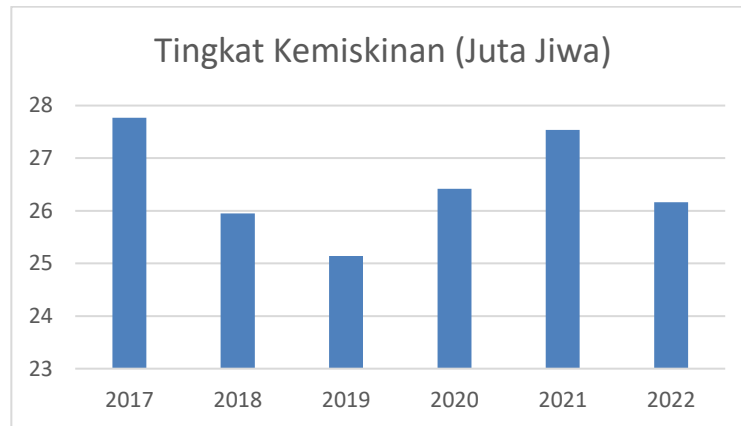
Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. **(Ratnia,2020)**

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan juga tepat sasaran. **(Ratmono, 2016).**

1. Tingkat Kemiskinan

Rata-rata tingkat kemiskinan Tahun 2017–2022 di Indonesia mengalami penurunan dari 2017-2019, akan tetapi pada Tahun 2010–2021 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan kembali dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga perekonomian Dunia khususnya di Indonesia mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan Kembali, hal tersebut berdasarkan data kemiskinan yang diambil dari BPS dengan data sebagai berikut:

Data Kemiskinan 2017-2022

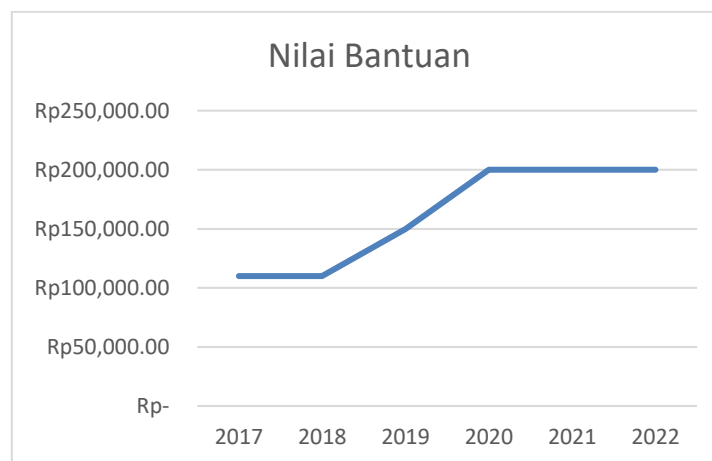


Sumber data: BPS

2. Target jumlah dan nilai bantuan penerima bantuan

Sejak Tahun 2017-2022 nilai bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami kenaikan secara bertahap, yaitu :

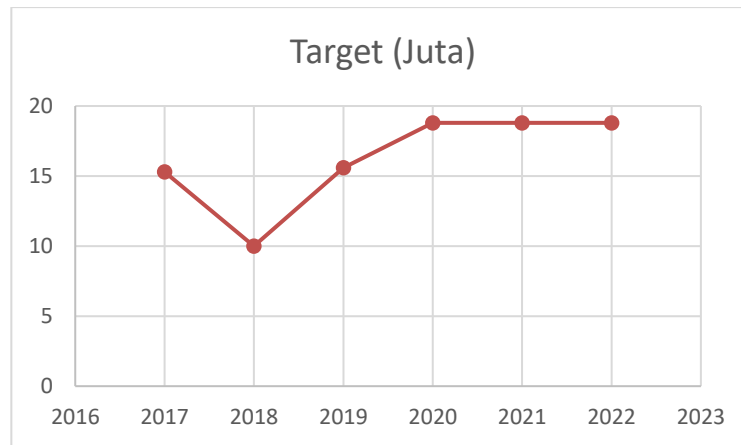
Nilai Bantuan yang Diterima 2017-2022



Sumber data: Kementerian Sosial

Sedangkan target penerima bantuan mengalami naik turun dari Tahun 2017-2022, hal tersebut terlihat dalam skema gambar dibawah ini

Target Penerima Bantuan 2017-2022



Sumber Data: Kementerian Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Bantuan Sosial adalah berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, sedangkan Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, Pemerintah dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang telah menyalurkan bantuan sosial program sembako di 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan target penerima bantuan dan nilai bantuan yang berbeda setiap tahunnya.

Permasalahan jumlah target penerima bantuan sosial serta nilai bantuan yang diterima oleh masyarakat tidak didasarkan pada angka kemiskinan yang ada di Indonesia pada rentang waktu 2017–2022. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakefektifan pemberian bantuan sosial dikarenakan angka kemiskinan yang sudah menurun, akan tetapi nilai bantuan yang diberikan semakin meningkat. Kondisi tersebut yang melatarbelakangi peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Pemberian Bantuan Sosial Program Sembako terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia.”

METODE PENELITIAN

Artikel Tentang Efektifitas Pemberian Bantuan Sosial Program Sembako terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia memerlukan identifikasi dan pemahaman mendalam untuk melihat konteks sosial ekonomi yang melingkupi permasalahan penelitian dan efektifitas dari bantuan sembako terhadap tingkat kemiskinan di tahun 2017–2022.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Menurut Maxwell¹³ penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses. Sehingga tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan terkait keefektifitasan bantuan sosial program sembako terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia dimana sudah berjalan lebih dari 5 Tahun.

Pengukuran efektifitas pada penelitian ini menggunakan Analisa SWOT sebagaimana yang disampaikan oleh Yudho,dkk (2021) pada bukunya yang berjudul Metode SWOT AHP (Dalam

merencanakan strategi pertahanan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi tersebut akan dijelaskan dalam Metode Analisa SWOT, akan tetapi dalam hal ini Perusahaan atau Organisasi kami asumsikan sebagai Program Bansos Sembako sehingga dapat kami uraian sebagai berikut:

1. Strength

Menurut Freddy Rangkuty (2011) strength adalah Kekuatan merupakan sumber daya/kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Sejalan dengan hal tersebut Yudho, dkk (2021) juga menyampaikan bahwa strength merupakan situasi yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini atau masa yang akan datang. Dan untuk menguraikannya ada 5 indikator yang harus dipenuhi, namun dalam peneitian ini hanya 5 indikator yang memenuhi dan relevan, selain itu juga terdapat 4 indikator yang beririsan, sehingga peneliti menggabungkan menjadi 1 indikator, diantaranya:

a. Kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organsiasi kita?

Kelebihan Program bantuan sosial sembako merupakan program bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran.

b. Apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik dan keunikan apa yang dimiliki dari perusahaan atau organisasi lainnya?

Program bantuan sosial program sembako memiliki kelebihan dibanding program bantuan lainnya dikarenakan program ini memiliki *multiplayer effect* atau efek berganda yang lebih besar dibandingkan program bansos lain. Contohnya adanya banyak pihak yang menerima manfaat selain masyarakat miskin yang menerima bantuan. Misalnya Beras, dimana pihak yang menerima manfaat adalah Petani, Perusahaan Pengolahan beras, Perusahaan Distribusi, *E-Warong* (adalah warung yang ditunjuk oleh Bank untuk menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat miskin). Secara tidak langsung bantuan ini juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar untuk menjadi TKSK dan Pendamping Sosial (masyarakat yang membantu penyaluran bantuan sosial program sembako).

c. Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan?

Konsumen dalam hal ini, peneliti asumsikan adalah penerima manfaat. Dalam hal ini masyarakat merasa terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, bantuan ini juga ditujukan agar masyarakat juga terpenuhi gizinya serta mencegah stunting;

2. Weakness

Menurut Freddy Rangkuty (2011) Weakness merupakan keterbatasan/ kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya/ kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Sejalan dengan hal tersebut Yudho, dkk (2021) juga menyampaikan bahwa weakness Adalah kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh Perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negative pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. untuk menguraikannya ada 5 indikator yang harus dipenuhi, namun dalam

peneitian ini hanya 3 indikator yang memenuhi dan relevan, diantaranya:

a. Apa yang dapat kita tingkatkan dalam perusahaan atau organisasi?

Hal yang harus ditingkatkan dalam Program Bansos Sembako ini adalah pemahaman dari penerima manfaat terkait tujuan dari program ini, sehingga masyarakat penerima bantuan tidak memanfaatkan atau membelanjakan bantuan sesuai dengan tujuan dari program bansos sembako yaitu untuk membeli seluruh komponen sembako yang meliputi Karbohidrat, protein nabati dan hewani serta mineral.

b. Apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi kita?

Hal yang harus dihindari dalam pelaksanaan program bansos sembako adalah

- 1) Adanya *Fraud* atau korupsi yang dilakukan oleh pihak tertentu, misalnya pada Tahun 2020 terdapat kasus korupsi bansos sembako yang melibatkan Menteri Sosial;
- 2) Ketidaktepatan sasaran dalam rangka penyaluran bansos program sembako, misalnya terdapat data masyarakat yang sudah dianggap ampu akan tetapi masih memperoleh bantuan.

c. Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu Kelemahan perusahaan atau organisasi kita?

Kelemahan yang dirasakan oleh penerima manfaat atau masyarakat miskin misalnya bantuan yang diterima tidak tepat waktu. Selain itu terdaat beberapa masyarakat yang mengeluhkan adanya kualitas sembako yang kurang layak untuk dikonsumsi.

3. Opportunities

Menurut Freddy Rangkuty (2011) Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut Yudho, dkk (2021) juga menyampaikan *opportunities* merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari, untuk menguraikannya ada 2 indikator yang harus dipenuhi, diantaranya:

a. Kesempatan apa yang dapat kita lihat?

Pada Program bantuan sosial sembako ini mempunyai kesempatan untuk membantu Pemerintah dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2024. Bantuan ini dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang berdampak pada peningkatan penghasilan, karena penghasilan merupakan salah satu indikator utama pengukuran kemiskinan.

b. Perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita?

Seharusnya tingkat kemiskinan berbanding lurus dengan jumlah masyarat miskin yang menerima bantuan, akan tetapi kondisi saat ini saat tingkat kemiskinan sudah mengalami penurunan, namun target atau jumlah masyarakat yang menerima bantuan tetap.

4. Threats

Menurut Freddy Rangkuty (2011) Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan Sejalan dengan hal tersebut Yudho, dkk (2021) juga menyampaikan bahwa *Threats* merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa

menghambat laju perkembangan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk menguraikannya ada 4 indikator yang harus dipenuhi, namun dalam penelitian ini hanya 3 indikator yang memenuhi dan relevan, diantaranya:

a. Hambatan apa yang sedang kita hadapi sekarang?

- 1) Belum dilakukannya *update* atas regulasi terkait kriteria masyarakat miskin;
- 2) Kebijakan belum mengakomodasi kondisi khusus (misalnya pandemi, kenaikan harga BBM dan minyak goreng).

b. Perkembangan Teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan atau organisasi kita?

Kalau menurut peneliti, perkembangan teknologi bukan menjadi ancaman akan tetapi menjadi peluang Program berjalan lebih efektif dan efisien, misalnya pelaporan dari daerah dapat dievaluasi secara langsung oleh Pemerintah Pusat, dimana sebelumnya pelaporan tersebut melalui proses yang cukup lama, karena adanya verifikasi secara manual.

c. Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan atau organisasi kita?

Terdapat Perubahan Peraturan yang mengubah kebijakan penyaluran bantuan sosial program sembako, misalnya terjadi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, dimana penyaluran bantuan sembako diberikan secara *cash*.

KESIMPULAN

a. Strength

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan strength pada Bansos Program Sembako adalah memastikan terpenuhinya tujuan dari program yaitu gizi seimbang serta mencegah stunting.

b. Weakness

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan *weakness* pada Bansos Program Sembako adalah

- 1) Belum efektifnya upaya pencegahan terjadinya *Fraud*;
- 2) Masih terjadinya permasalahan Ketidaktepatan sasaran dalam rangka penyaluran bansos program sembako;
- 3) Terdapat permasalahan terkait bantuan yang diterima masyarakat miskin yang tidak tepat waktu;
- 4) Adnya bahan sembako yang diterima masyarakat tidak layak konsumsi (kualitas rendah).

c. Opportunities

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan *Opportunities* pada Bansos Program Sembako adalah Program bansos sembako ini belum menjadi salah satu bantuan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan kemiskinan.

d. Threats

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan Threats pada Bansos Program Sembako adalah

- 1) Belum adanya *update* regulasi terkait kriteria masyarakat miskin, sehingga daerah memiliki kriteria masing-masing;

- 2) Kebijakan belum mengakomodasi kondisi khusus;
- 3) Adanya Perubahan Peraturan yang mengubah kebijakan penyaluran bantuan sosial program.

SARAN

a. Strength

Rekomendasi yang akan kami sampaikan terkait agar tujuan program dapat tercapai adalah Kementerian Sosial selaku Kementerian pelaksana program bansos sembako lebih aktif dalam melakukan sosialisasi pada tingkat daerah yang dapat dibantu oleh Pekerja Sosial kepada masyarakat penerima bantuan, hal tersebut dengan pemahaman tujuan apa saja akan dicapai apabila bantuan dibelikan sesuai dengan peruntukannya.

b. Weakness

Beberapa rekomendasi atas permasalahan yang peneliti simpulkan agar tercapainya Weakness, antara lain:

- 1) Kementerian Sosial dapat melakukan pemetaan Kembali atas resiko-resiko apa saja yang akan terjadinya serta melakukan mitigasi risiko dalam Bansos Program Sembako;
- 2) Tim Sosial di daerah diberikan tanggung jawab dan wewenang dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota masing-masing agar melakukan pemantauan dan pelaporan kepada Kementerian Sosial atas BNBA (*By Name By Address*) mana saja yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan, dan Kementerian Sosial agar dapat segera menghapus nama tersebut agar tidak memperoleh bantuan lagi pada penyaluran berikutnya;
- 3) Kementerian Sosial memiliki aturan dan pedoman pasti terkait tanggal penyaluran bantuan, dikarenakan dengan adanya keterlambatan bantuan mengakibatkan masyarakat tidak dapat atau tertunda pembelian sembakonya;
- 4) Kementerian Sosial dibantu oleh Tenaga Sosial daerah dan Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas kualitas bahan sembako yang dijual oleh E-Warong (warung yang ditunjuk untuk membeli bahan sembako), dan agar dalam pedoman atau aturan yang melandasi penyaluran bansos sembako mencantumkan bagi E-Warong yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya akan diberikan *punishment*, misalnya pemutusan kerjasamanya Kembali atau adanya ganti rugi.

c. Opportunities

Agar Kementerian Sosial dapat lebih aktif melakukan koordinasi Bersama dengan Kemenko PMK dan BPS agar dalam mempertimbangkan atau menghitung kemiskinan, salah satu faktor yang digunakan adalah data penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

e. Threats

Rekomendasi yang peneliti sampaikan agar Threats dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- 1) Kementerian Sosial agar segera melakukan *update atas regulasi*/aturan terkait kriteria rakyat miskin yang sudah ada, akan tetapi sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini diharapkan agar daerah tidak memiliki masing-masing

kriteria rakyat miskin (seragam) dikarenakan memitigasi adanya kepentingan dari pihak tertentu.

- 2) Peraturan dan pedoman bantuan sosial khususnya Program Sembako ini dapat digunakan juga untuk mengakomodasi kondisi tertentu, hal ini dikarenakan perubahan-perubahan kebijakan pada kondisi tertentu yang mengakibatkan Pemerintah Daerah kebingungan dalam pengawasannya (misalnya pada penyaluran bantuan sosial sembako pada masa kenaikan minyak goreng dilakukan penyaluran secara tunai atau *cash*)
- 3) Kebijakan khusus dalam rangka penyaluran bansos sembako yang diberikan pada wilayah tertentu akan sedikit menghambat Tenaga Sosial dalam melakukan pemantauan, akan lebih baik apabila metode penyaluran bantuan ini dilakukan secara seragam, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asep Adang Supriyadi, G. C. (2022). KEBIJAKAN EKONOMI KETAHANAN PANGAN DENGAN STRATEGY BLUE ECONOMY MENGHADAPI ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM. Asep Adang Supriyadi, Gabriel Choirul Alman, Rianto Rianto, Juliana Juliana, Suci Rahmayanti, M Asa'ari Yusuf, Ria Anggun Ariani, Cosmas Manukalo Danga, Feny Avisha, Lukman Yudho Prakoso, Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, 5.
- [2] Budi Pramono, L. Y. (2022a). ENERGY SECURITY POLICY OF PT. PERTAMINA FACES THE DYNAMICS OF FOREIGN POLICY. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2.
- [3] Budi Pramono, Lukman Yudho Prakoso, Gabriel Choirul Alman, Rianto, R., Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, Sri Murtiana, Haetami, H., Arifuddin Uksan, & Hikmat Zakky Almubaroq. (2022b). KEBIJAKAN EKONOMI DIGITAL DIANTARA PELUANG DAN ANCAMAN DI MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(11), 3225–3230. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/3608>
- [4] Freddy Rangkuty (2011), Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, Jakarta : Salmba Empat;
- [5] Guntur Eko Saputro Juliana, Lukman Yudho Prakoso (2022), Implementation of Defense Industry Policy in Supporting National Economic Growth. Implementation of Defense Industry Policy in Supporting National Economic Growth, 4.
- [6] Juliana Juliana, G. E. (2022). The Policy of PT Len As a Main Integrator on Increasing National Income. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 1.
- [7] Listiyono, Y., Pramono, B., Prakoso, L. Y., Prihantoro, K., & Sianturi, D. (2021). MARINE DEFENSE STRATEGY IN SECURING INDONESIAN ARCHIPELAGIC SEA Lanes (ALKI) TO REALIZE MARITIME SAFETY AND MAINTAIN INDONESIAN SOILITY. International Journal of Education Social Science Research, 4(IJESSR), 224–237.
- [8] Lukman Yudho Prakoso, S. S. (2020). Sea defense strategy and urgency of forming maritime command center. Jurnal Pertahanan, 201.
- [9] Lukman Yudho Prakoso, G. S. (2021). Implementation of the Défense Public Policy Defend The State In Indonesian Universities. Academy of Strategic Management Journal, 1.
- [10] Lukman Yudho P, Suhirwan, & Kasil P (2021), Metode SWOT AHP, Jakarta: CV Aksara Global Akademia;

- [11] Meideri, A., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (n.d.). Total War Strategy through Optimizing Pancasila Values.
- [12] Metode SWOT AHP dalam merencanakan strategi pertahanan, (2021) (testimony of Kasih Prihantoro, Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan Suhirwan, Mia Kusmiati, Suhirwan Lukman Yudho Prakoso Kasih Prihantoro, Mia Kusmiati editor Suca Rusdian, Mia Kusmiati editor, Kasih Prihantoro, Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan Suhirwan, Mia Kusmiati, & S I P Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso. MAP, Dr. Suhirwan,, ST., M.MT., CIQnR, CIQaR., IPU, Laksda TNI Dr. Kasih Prihantoro, S.E., M.M., M.Tr.(Han)).
- [13] Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako (2020), TNP2K, Jakarta;
- [14] Ratmono, dwi (2016), Determinan *Fraud* Belanja Bantuan Sosial, Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 7 Nomor 3 Halaman 328-340, ISSN 2086 – 7603;
- [15] Ratnia Solihah (2020), Peran KPK dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal TAPIs Vol. 16 No. 2 Juli—Desember 2020.
- [16] Rianto, R., Prihantoro, K., Suhirwan, S., Santosa, A., Pramono, B., Saputro, G., & Prakoso, L. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK DESA WISATA SOLUSI EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(5), 1441-1450. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.921>